

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN
SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN**

SKRIPSI



OLEH:

FITRA IRFANDI
NPM : 16300131

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN
SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FITRA IRFANDI
NPM : 16300131

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN
SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:

OLEH:

FITRA IRFANDI
NPM : 16300131

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 14 - 01 - 2020
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. BAMBANG YUNARKO S.H., M.H. (KETUA)

1. 

2. SETO CAHYONO, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

2. 

3. NOOR TRI HASTUTI, S.H., M.Hum. (ANGGOTA)

3. 

**IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN
SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA
KEPOLISIAN**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

FITRA IRFANDI
NPM : 16300131

SURABAYA, 23 Desember 2019

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

Noor Tri Hastuti., S.H., M.Hum.

MOTTO

“Jadilah seperti pohon yang tumbuh dan berbuah lebat.
Dilempar dengan batu, tetapi membalasnya dengan
buah”

Abu Bakar Ash-Shiddiq

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN ”** dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Ria Tri Vinata, S.H, LLM, Selaku dosen wali yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.
4. Ibu Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.

5. Bapak Ardhiwinda Kusuma Putra, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan ketelatenan telah meluangkan banyak waktu dan pikiran dalam memberikan pengarahan selama mengerjakan skripsi ini.
6. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta ibu Maria dan bapak Rasman, yang tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya sampai bisa disini.
7. Terima kasih saudara kandung saya Saiful Arifin, Samsul Arifin dan Nur Hanifah yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya sampai bisa disini.
8. Terimah kasih kepada keluarga besar saya tercinta yang selalu memberi saya semangat, doa, dan yang telah memberi saya dorongan moral dan materil sehingga saya bisa mencapai Pendidikan Tinggi sampai saat ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
11. Mbak Debby Eka Kartikasari., S.H yang selalu membantu dan menyemangati dari awal sampai terbentuknya skripsi ini.

12. Organisasi Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2017–2018 yang sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pentingnya berorganisasi selama masa perkuliahan.
13. Rekan-rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Periode 2018-2019 dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya periode 2019 – 2020 yang selalu mensupport dan menjadi keluarga kedua saya selama masa perkuliahan.
14. Teman –teman ena ena squad Bisma, Mecha, Doci, Rama, One, Rahmad, Nabilla, Elzy, Repsi, Cut, yang selalu menemani, membantu dan menghiasi hari-hari saya selama masa perkuliahan.
15. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus, khususnya Faiz, Yolanda, Yosef, Dani, yang tidak pernah bosan mendengarkan keluhan saya dan teruntuk teman-teman yang belum skripsi lain semoga segera menyusul.
16. Teman – teman SMK khususnya Askatul Squad Abrian, Aryo, Dimas, Ucup, Rendy, Andi, Derry, Frismanda, Candra, Saiful, Afif, Faried, Faisal, Abi, Fathur, Andri.
17. Teman – teman Ancil Reborn Bima, Ridho, Kharisma, Arthur, Raka, Adit, Nanda, Irwan.
18. Teman – teman vespa Oxsadon Gege, Munir, Alan, Novem, Irfan, Divo, Faisal, Agil, Rofik, Yohan.

19. Rekan-rekan PKPA Mas Afif, Mas Angga, Mas Jordy, Mbak Venny, Mas Samba yang selalu support, memberi arahan dan meluangkan waktu untuk menemani dalam mengerjakan skripsi ini.

20. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

FITRA IRFANDI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fitra Irfandi
NPM : 16300131
Alamat : Jl. Tambak Dalam Baru Barat 4/41 Surabaya
No. Telp (HP) : 083831393332

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI HUKUM SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN SEBAGAI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN”**

adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, ⁹-- Desember 2019

Yang menyatakan,



FITRA IRFANDI

ABSTRAK

Perkembangan hukum Indonesia merupakan harapan untuk menciptakan hukum yang menjiwai bangsa maka sistem hukum Indonesia masih terus mengalami perubahan mencari suatu sistem hukum yang tepat untuk diterapkan. Sistem hukum yang tepat harus mengetahui bentuk pemerintahan yang tepat untuk dijadikan sebuah sistem dalam menjalankan sebuah negara hukum. Suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat – alat perlengkapan negara tertinggi di suatu negara. Alat perlengkapan negara merupakan suatu golongan warga negara yang bertugas menjalankan kekuasaan negara seperti (Polisi). Salah satu tugas di dalam bidang administrasi yaitu pelayanan kepolisian diantaranya pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam hal ini surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri. Berdasarkan Pasal 21 UU Kepolisian, sudah diatur bahwa salah satu syarat penerimaan anggota kepolisian tidak pernah dipidana.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan. Pertama, SKCK di dalam persyaratan calon anggota kepolisian yang dimana diatur di dalam Pasal 21 UU Kepolisian dimana setiap calon anggota polisi tidak diperbolehkan pernah melakukan tindakan pidana atau dalam pemeriksaan pidana, SKCK yang dibuat oleh instansi kepolisian merupakan syarat materiil di dalam penerimaan calon anggota baru kepolisian yang bersifat mutlak, Kedua, Persyaratan di dalam penerimaan anggota kepolisian bersifat mutlak, namun pejabat yang berwenang memiliki suatu tindakan diskresi bertujuan untuk melancarkan, mengisi kekosongan hukum. Diskresi di dalam kepolisian diatur di dalam Pasal 18 UU Kepolisian, kepolisian berhak melakukan tindakan diskresi di dalam wilayah kewenangannya. Meskipun tindakan diskresi itu melawan hukum, diskresi tetap dilakukan demi tujuan yang baik.

Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian Republik Indonesia, Penerimaan Anggota, Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Abstract

The development of Indonesian law is a hope to create a law that animates the nation, so the Indonesian legal system continues to experience changes seeking an appropriate legal system to apply. The right legal system must know the right form of government to be used as a system in running a rule of law. A particular system that explains how the relationship between equipment - state equipment is highest in a country. State equipment is a class of citizens tasked with exercising state power such as (the police). One of the tasks in the field of administration is police services including the making of Police Registration Certificate (SKCK) in this case an official certificate issued by the National Police. Pursuant to Article 21 of the Police Law, it has been regulated that one of the conditions for the admission of members of the police has never been convicted.

The method used in this thesis is to use normative research methods with library research which is a study of the legislation and literature or reading material relating to the material discussed.

Based on research conducted research results there is a conclusion. First, SKCK in the requirements of prospective police officers which is stipulated in Article 21 of the Police Law where each prospective police member is not allowed to have committed a criminal act or in a criminal examination, SKCK made by a police agency is a material requirement in the recruitment of new candidates for police which is absolute, Second, the Requirements in the acceptance of members of the police are absolute, but the authorized official has an act of discretion aimed at launching, filling the legal vacuum. Discretion within the police is regulated in Article 18 of the Police Law, the police have the right to carry out discretion within their jurisdiction. Although the act of discretion is against the law, discretion is still carried out for a good cause.

Keywords: *Discretion, The Police of Reublic Indonesian, Admission of Members, Police certificate*

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	23
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	25

BAB II SKCK MENJADI SYARAT DALAM PENERIMAAN ANGGOTA

KEPOLISIAN

1. Kedudukan SKCK Dalam Persyaratan Penerimaan
Anggota 26
2. Klasifikasi SKCK Dalam Persyaratan Calon Anggota
Kepolisian 29
3. Substansi di Dalam SKCK 30

BAB III IMPLIKASI HUKUM ATAS SKCK YANG MEMUAT ADANYA

CATATAN DALAM PENERIMAAN ANGGOTA BARU

1. Dasar Regulasi 40
2. Kewenangan Polisi 41
3. Pengisian Jabatan Polri 55

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 62